

Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Ahmad Fahrudin

Fakultas Dakwah, Institut PTIQ Jakarta, Indonesia

email: fahrudin@ptiq.ac.id

 <https://doi.org/10.53678/elmadani.v2i02.290>

Abstrak

Komunikasi pejabat publik sangat memengaruhi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan berkorelasi positif dengan efektivitas penanganan Covid-19. Sayangnya, sebagaimana ditemukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dari media online yang *credible*, terdapat sejumlah pejabat publik yang sering melontarkan pernyataan kontroversial tentang Covid-19 yang tidak sepenuhnya berbasis ilmiah, data akurat, dan fakta empirik. Selain menimbulkan problem etika komunikasi, hal ini telah memunculkan tanggapan pro kontra, kegaduhan, kesimpangsiuran, dan mengganggu serta menghambat percepatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pejabat publik memperhatikan dan mengedepankan etika komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19 agar pandemi Covid-19 dapat dikendalikan, dan cepat dienyahkan dari bumi Indonesia.

Kata Kunci:

Etika Komunikasi, Pejabat Publik, Pandemi Covid-19

Abstract

Communication of public officials greatly influences the public to comply with the corona virus disease (Covid-19) health protocol and is positively correlated with the effectiveness of handling Covid-19. Unfortunately, as this study found using descriptive qualitative methods and data collection techniques from credible online media, there are a number of public officials who often make controversial statements about Covid-19 that are not fully based on scientific, accurate data, and empirical facts. In addition to causing ethical communication problems, this has led to pro and contra responses, noise, confusion and disrupts and hinders acceleration in handling the Covid-19 pandemic. Therefore, this study recommends that public officials pay attention to and prioritize communication ethics in handling the

Covid-19 pandemic so that the Covid-19 pandemic can be controlled, and quickly removed from Indonesian soil.

Keywords:

Communication Ethics, Public Officials, Covid-19 Pandemic

Pendahuluan

Pejabat publik atau negara yang mewakili suatu lembaga atau menjadi juru bicara dari suatu organisasi, dipandang sebagai sumber kolektif (*collective source*)¹ dan merupakan komunikator politik yang memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik². Sebagai pejabat publik, tutur katanya harus berkualitas dan bijak. Sayangnya di masa pandemi Covid-19, banyak pejabat publik yang melontarkan pernyataan kontroversial tanpa mengindahkan etika komunikasi. Sehingga banyak menimbulkan kegaduhan, umpan balik negatif, dan berkontribusi menjadikan kurva dan *trend* pandemi Covid-19 di Indonesia masih tetap tinggi.

Menurut Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan penambahan kasus positif di Indonesia masih terus naik dan mencapai angka 17,61 persen, jauh melampaui rata-rata kasus aktif di dunia yang sebesar 6,58 persen.³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan juga jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh Indonesia telah mencapai 2.852.200. Kemudian yang meninggal sebanyak 72.879 orang, dan 536.292 positif aktif (masih sakit), serta 2.243.029 orang dinyatakan sembuh.⁴

Banyak faktor yang menyebabkan kurva dan *trend* pandemi Covid-19 masih tinggi. Salah satunya, sebagaimana dicermati Sulaiman dan Sani, karena absennya komunikasi publik yang tepat, serta buruknya tata kelola dan transparansi data,

¹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Paska-Orde Baru*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008), 32.

² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, (Remaja Rosdakarya Bandung), 2011, 29.

³<https://kabar24.bisnis.com/read/20210717/15/1418883/koordinator-tim-pakar-covid-19-indonesia-sudah-seperti-india>, diakses 17 Juli 2021.

⁴<https://www.bnpb.go.id/berita/angka-tertinggi-kesembuhan-covid19-melebihi-34-ribu-orang-per-hari-dengan-angka-kumulatif-mencapai-2-1-juta-orang-sembuh>, diakses 20 Juli 2021

termasuk mengatur informasi Covid-19. Alih-alih menggunakan pendekatan komunikasi efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah justru menyampaikan pesan-pesan yang cenderung meremehkan. Bahkan menyangkal bahaya, dampak, dan skala wabah, dilandaskan logika semu bahwa hal ini akan dapat membuat warga “tidak panik” demi kelangsungan kegiatan ekonomi.⁵

Dalam catatan, bukan saat pandemi Covid-19 saja pejabat publik melontarkan pernyataan kontroversial, melainkan sudah sering terjadi. Contohnya Menteri Agama Fachrul Razi (kemudian diganti oleh Yaqut Cholil Qoumas) melontarkan soal agen radikalisme *good looking*,⁶ doa disisipi bahasa Indonesia, wacana pelarangan cadar, celana cingkrang, pengguna *niqab* atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah, heboh khutbah Jum’at tanpa sholawat⁷, dan lain sebagainya.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial dengan menganjurkan orang kaya menikahi orang miskin. Usulan tersebut dengan alasan adanya salah pengertian anjuran dalam Islam kalau mencari jodoh harus *sekufu*, atau setara. Akibatnya, orang miskin sama-sama cari yang miskin. Dampaknya, jadilah rumah tangga miskin baru.⁸ Sementara Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pernah berujar “kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Selain itu ia mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara.”⁹

⁵ L. Sulaiman dan S.K.Sani, Diskursus Komunikasi Publik: Menyikapi Covid-19 Antara Ada dan Tiada, dalam E.L Pambayun, Dialektika Dosen Indonesia dalam Menyikapi Covid-19: Pendekatan Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Linguistik, dan Agama/Dakwah, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 47

⁶ Adrian Mustafa dan Nurul Mujahidah, “DISKURSUS CADAR DALAM MEMAKNAI PANDEMI COVID-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol 2, No 1 (2020)

⁷B.M.A.Kusuma Dan T. Octastefani, Covid-19 Dan Transformasi Keberagamaan

Hak Beragama, Kebijakan Asimetris, Dalam Serial Buku Bunga Rampai 3 Dinamika dan Sense of Crisis di Masa Pandemi Covid-19, (Yogyakarta: Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT) UIN Sunan Kalijaga, 2020),184

⁸<https://nasional.tempo.co/read/1309677/alasan-muhadjir-effendy-usul-fatwa-orang-kaya-nikahi-orang-miskin>, Kamis, 20 Februari 2021.

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1307415/kepala-bpip-dalam-berbangsa-geser-kitab-suci-ke-konstitusi>, Kamis, 13 Februari 2020.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), pemerintah banyak melakukan *blunder* atau kekeliruan dalam berkomunikasi. Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pernyataan pemerintah terkait Covid-19.¹⁰ Dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi pada masa pra-krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Kekeliruan dalam komunikasi itu disampaikan oleh berbagai pejabat, dari yang tertinggi hingga tingkat eselon 1. Pejabat itu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan. Pada fase pra krisis yang dimulai dari akhir Januari hingga awal Maret 2020, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus virus corona di Indonesia.¹¹

Pernyataan kontroversial tentang Covid-19 rupanya bukan hanya khas Indonesia, melainkan merupakan fenomena global. Pada 22 Januari 2020, dua hari setelah virus corona dilaporkan di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, dalam wawancara CNBC, menyepelekan infeksi Covid-19 di negara tersebut. Hal serupa dilakukan Jair Bolsonaro yang memenangi kursi kepresidenan di Brasil pada 2018 dengan beberapa kali tampil di tengah kerumunan bersama simpatisannya. Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga sempat menyepelekan Covid-19. Dengan mengancam untuk menembak pelaku keributan yang menolak kebijakan '*lockdown*' dan pemberlakuan jam malam. Sedangkan Presiden Belarus menyebut virus tersebut "tidak lebih ketimbang psikosis". Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tidak

¹⁰ F. Junaedi (ed), *Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020)

¹¹ Ahmad Fachruddin, *Komunikasi Krisis Gubernur Anies Baswedan dalam Penanganan Darurat Covid-19*, dalam E.L Pambayun (ed), *Dialektika Dosen Indonesia dalam Menyikapi Covid-19: Pendekatan Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Linguistik, dan Agama/Dakwah*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 31

membuat pernyataan kontroversial mengenai virus corona, tapi harus menanggapi kontroversi yang dibuat salah satu anggota kabinetnya, Menteri Pertahanan Oppa Muchinguri, yang mengatakan pandemi ini adalah balas dendam dari Tuhan terhadap negara Barat yang memberlakukan sanksi terhadap negara Afrika tersebut.¹²

Banyaknya pejabat publik melontarkan pernyataan kontroversial menjadi 'santapan' empuk media atau pers untuk meliput dan mempublikasikannya. Sebab, awak media berpendapat, pembaca senang dengan informasi yang sensasional, konflik dan penuh kejutan. Padahal sensasional adalah salah satu bentuk tahayul pers yang harus dijaui.¹³ Dalam dunia pers di barat yang juga sudah dikenal luas Indonesia, ada istilah: *"If a dog bit a man, that not news; if a man bite dog, that news"*; (Kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita; kalau orang menggigit anjing, itu baru berita).¹⁴

Hal yang juga memperkeruh keadaan adalah berseliwerannya hoaks atau informasi palsu seputar pemberitaan Covid-19. Dalam beberapa kasus, berita hoak yang menjadi viral juga ditengarai telah mengancam stabilitas sosial-politik dan merongrong wibawa pemerintah.¹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan salah satu alasan masyarakat tidak percaya Covid-19 karena terpengaruh isu hoaks alias berita bohong. Data itu sejalan dengan laporan hoaks Covid-19 pada 23 Januari 2020 hingga 12 Mei 2021 yang jumlahnya mencapai 1.587 isu. Laporan yang sama menunjukkan mayoritas isu hoaks ditemukan di media sosial.¹⁶

¹²<https://news.detik.com/bbc-world/d-4967000/deretan-pernyataan-kontroversial-pemimpin-dunia-seputar-virus-corona>, Senin 6 April 2020.

¹³AS Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, Panduan Praktis Jurnalis Profesional, (Remaja Rosdakarya, 2022), 76.

¹⁴Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori & Praktik*, (Remaja Rosdakarya Bandung, 2009), 163.

¹⁵ C.M. Taufik, Modifikasi Nilai Kebenaran Versi Media Pemberitaan pada Covid-19, dalam E.L. Pambayun (ed) *Dialektika Dosen Indonesia dalam Menyikapi Covid-19: Pendekatan Komunikasi, Psikologi, Pendidikan, Linguistik, dan Agama/Dakwah*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 20

¹⁶ Saiful Bahri, LITERASI DIGITAL MENANGKAL HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.10, No.1, 2021

Dengan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pernyataan kontroversial pejabat publik seputar Covid-19 yang terekam jejak digitalnya pada sejumlah media *on line*. Dengan penelitian ini diharapkan terdeskripsikan sejumlah pernyataan kontroversial pejabat publik seputar Covid-19, dari sudut pandang atau analisis etika komunikasi. Adapun manfaat dari penelitian diharapkan, ke depannya pejabat publik lebih mengedepankan etika komunikasi dengan cara dapat menahan diri dan tidak sembrono melontarkan pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan dan kontra produktif terhadap ikhtiar penanganan dan pengendalian Covid-19.

Landasan Teori

Pambayun menyatakan bahwa etika berasal dari kata “ethos” (Yunani) yang artinya perbuatan yang dapat menimbulkan kredibilitas seseorang secara moral.¹⁷ Sedangkan, F.M. Suseno mengartikan etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. F.M. Suseno mendefinisikan etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Etika bisa didefinisikan sebagai filsafat tentang bidang moral.¹⁸ Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya.¹⁹ H. Devos kemudian membagi etika ke dalam dua jenis, yakni: a. Etika deskriptif. Merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, b. Etika Normatif. Mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma- norma kesusilaan sebagai panutannya.²⁰

¹⁷ E.L. Pambayun, *Communication Quotient: Pendekatan Emosional dan Spiritual*, (Bandung: Rosdakarya, 2013), 8-9

¹⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat-Kanisius, Yogyakarta, 1987, 13.

¹⁹ R. Poedjawijatna, *Etika, Filsafat Tingkah Laku*, Bina Aksara, 1982, 6.

²⁰ H. De vos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987), 8-10.

Sementara komunikasi, secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni: *communico* yang artinya membagi, dan *communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih²¹. Sedangkan secara terminologis, komunikasi dapat dimaknai sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui media yang menimbulkan efek tertentu.²² Tujuan akhir komunikasi, penerima pesan dapat mengerti dan memahami pesan yang disampaikan pemberi pesan dengan sederhana namun tepat atau akurat.²³

Sejauh yang dapat dicermati, belum ada definisi mengenai etika komunikasi. Meskipun demikian, sejumlah ahli berupaya untuk melakukannya. Misalnya, Richard L. Johannesen yang berpendapat banyak orang beranggapan bahwa dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan etika komunikasi sebagai suatu nilai-nilai atau norma mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Lalu Johannesen menyebut tiga tujuan etika komunikasi, yaitu: (1) membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup ini; dan (3) untuk menciptakan kebahagiaan.²⁴

Sementara, W.N. Kadri mengartikan perdebatan sebagai pernyataan yang menimbulkan konflik dan kontroversial. Pengertian lain sebuah diskusi panjang tentang sebuah pertanyaan penting dimana pendapat yang bertentangan berbenturan; perdebatan; perselisihan.²⁵ Pernyataan kontroversial menjadi problem etika komunikasi yang krusial, manakala pernyataan tersebut dilontarkan tanpa didukung metode ilmiah yang memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis, dan didukung data empiris yang valid. Yakni: menunjukkan derajat ketapan antara data

²¹ Chafied Changara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (RajaGrafindo Persada, 2009), 13.

²² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Rosda Karya, 2019), 10.

²³ RR. Ponco Dewi Karyaningsih, *Ilmu Komunikasi*, (Samudra Biru, 2018), 49.

²⁴ Richard L. Johannesen, *Etika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

²⁵ Wahab Nur Kadri, *Dialektika Komunikasi pada Debat Pilpres 2019 dalam Perspektif Al-Qur'an*, *El-Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol.1, No.1, (2020) DOI: <https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i01.49>

yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.²⁶

Pernyataan kontroversial termasuk bagian proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media seperti bahasa, kiat, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.²⁷ Sedangkan Richard L Weaver memberikan karakteristik dalam komunikasi antarpribadi yaitu: melibatkan paling sedikit dua orang, adanya umpan balik atau *feedback*, tidak harus tatap muka, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh atau *effect*. Tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks.²⁸

Istilah “Pejabat Publik” terdiri dari dua suku kata, yaitu “Pejabat” dan “Publik”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi pengertian “Pejabat” sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah ‘Publik” diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa “Pejabat Publik” adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak.

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 11 merinci Pejabat Negara. Antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR dan DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, 2013), 2.

²⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Rosda Karya, 2019), 11.

²⁸ Muhammad Budyatna dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 14.

Pejabat publik atau negara terikat dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4 poin 1 yang mewajibkan ASN menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. Kemudian pada Pasal 5 dari UU tersebut yang mengatur kode etik ASN ayat 2 poin i memerintahkan agar pejabat publik memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

Fokus penelitian ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah pejabat tentang Covid-19, dalam bentuk teks. Menurut Kridalaksana, teks merupakan suatu ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur berupa kalimat, kata dan lainnya dalam satuan bahasa lengkap yang bersifat abstrak³⁰. Teks bagian proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media seperti bahasa, kiat, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.³¹

Pernyataan kontroversial yang diteliti bersumber atau dimuat media massa khususnya media *on line* yang dianggap *credible* dan bukan informasi atau berita yang masuk dalam kategori *fake*, hoax atau bohong. Jangka waktu penelitian sejak 14 Februari 2020 hingga 17 Juli 2021. Untuk mengetahui suatu kebenaran suatu berita,

²⁹Moleong, J. Lexxi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda Karya, Bandung 2007), 6.

³⁰Kridalaksana, Harimurti, *Kamus Linguistik Edisi Keempat*, (Gramedia Pustaka Utama, 2011), 238.

³¹Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2019),

dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya mericek ke Kominfo, mericek ke sejumlah situs berita yang juga memuat berita sama atau melacak jejak digitalnya di media sosial lainnya, khususnya Youtube. Sejumlah pernyataan kontroversial pejabat kemudian *ditracking* dan yang menjadi *sample* penelitian ini sebagai berikut:

Komunikasi Lisan yang Menimbulkan Kontroversi

No.	Komunikator	Pesan	Sumber
	Menko Perekonomian Airlangga	Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (15/2/2020) mengutip kelakar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan: "Dalam kelakarnya, Menko Perekonomian Airlangga bilang: Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk. Tapi omnibus law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus," cuit Mahfud.	https://www.suara.com/news/2020/02/15/141802/kelakar-menteri-airlangga-izinnnya-berbelit-beli-t-virus-corona-tak-masuk? , Sabtu 15 Februari 2020, https://nasional.tempo.co , 2 Maret 2020.
1.	Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi	"Virus corona tidak ditemukan di Indonesia karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari kegembiraan memakan nasi kucing". "Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, insya Allah ya, (virus) COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," kata Budi Karya saat menyampaikan pidato ilmiah dalam acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Senin (17/2).	https://nasional.tempo.co/read/1437577/setahun-pandemi-covid-19-ini-kelakar-pejabat-indonesia-soal-corona , Selasa, 2 Maret 2020, https://republika.id , 17 Februari 2020.
2.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	"Dari hasil <i>modelling</i> kita yang ada, cuaca Indonesia, ekuator ini yang panas dan juga <i>humidity</i> tinggi itu untuk Covid-19 ini nggak kuat," ujar Luhut saat melakukan rapat koordinasi yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/4/2020).	https://news.detik.com/berita/d-4962441/luhut-dari-hasil-modelling-virus-corona-nggak-kuat-di-cuaca-indonesia , 2 April 2020, https://bisnis.tempo.co , 7 April 2020.

3.	Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah (NTB)	"Susu kuda liar dipercaya masyarakat NTB sebagai penangkal virus Corona atau Covid-19".	https://nasional.tempo.co/read/1318169/gubernur-ntb-sebut-susu-kuda-liar-dipercaya-jadi-penangkal-corona , Rabu, 11 Maret 2020, https://rri.co.id , Rabu 11 Maret 2021.
4.	Wakil Presiden Ma'ruf Amin	"Ternyata di sini ada yang bisa menangkal corona yang ditawarkan Pak Gubernur, yaitu susu kuda liar," kata Ma'ruf saat membuka acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu, 11 Maret 2020.	https://nasional.tempo.co/read/1318272/gubernur-maruf-amin-soal-susu-kuda-liar-bisa-tangkal-virus-corona .co, Rabu, 11 Maret 2020, https://www.cnnindonesia.com , Rabu, 11 Maret 2021.
5.	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," lanjut dia.	https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/16255511/menkes-belum-ada-virus-corona-terdeteksi-harusnya-bersyukur-bukan? , Kompas.com, Selasa, 11 Februari 2020, https://nasional.kontan.co.id , Selasa, 11 Februari 2021.
6.	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	"Salahmu sendiri kok beli ya," kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (15/2/2020). "Enggak usah (pakai masker). Masker untuk yang sakit," kata dia.	https://nasional.kompas.com/read/2020/02/15/17364441/harga-masker-tinggi-menkes-salahmu-sendiri-kok-beli? , Sabtu, 15 Februari 2020. https://www.liputan6.com , Sabtu, 15 Februari 2021.

7.	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	"Kami cuma bisa doa aja, kami sambil bekerja, mengecek, melakukan tindakan-tindakan <i>detect</i> . Kalau sudah ada baru respons. Selama masih <i>detect</i> dan <i>prevent</i> , ya itu dikerjakan sesuai standar WHO," kata Terawan.	https://nasional.tempo.co/read/1313016/terawan-sebut-doa-jadi-salah-satu-alasan-indonesia-bebas-covid-19 , Jum'at, 28 Februari 2020.
8.	Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto	"Harus diingat ini penyakit <i>self limited disease</i> , penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sama seperti virus lain," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302162005-20-479814/menkes-virus-corona-penyakit-yang-bisa-sembuh-sendiri , Senin 2 Maret 2020.
9.	Presiden Joko Widodo	"Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan menjadi <i>booming</i> bagi pariwisata," kata Jokowi.	https://www.cnbcindonesia.com/news/20200416113747-4-152335/jokowi-yakin-corona-kelar-di-akhir-2020-semua-akan-liburan , Kamis 16 April 2021, Kompas.com, 16 April 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news .
10.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	"Tidak usah berkomentar macam-macam, pemerintah melakukan yang terbaik. Dari apa yang kami dapat sampai tadi malam, Presiden juga sudah nanya ke saya, saya bilang tidak ada yang mengkhawatirkan jika kita sudah mengerjakan sesuai bidang masing-masing," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin, 5 Juli 2021	https://bisnis.tempo.co/read/1479923/saoal-penanganan-covid-19-luhut-minta-jangan-ada-yang-berkomentar-macam-macam , Senin, 5 Juli 2021.
11.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang	https://nasional.tempo.co/read/1482449/luhut-ada-yang-bilang-penanganan

	dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring.	-covid-19-tidak-terkendali-datang-saya-tunjukkan-ke-mukanya, Senin, 12 Juli 2021.
12.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	"Saya mohon supaya kita paham varian delta ini varian yang tidak bisa dikendalikan," kata Luhut	https://nasional.tempo.co/read/1483669/luhut-covid-19-varian-delta-tidak-bisa-dikendalikan , Kamis, 15 Juli 2021, https://www.kompas.tv , Kamis, 15 Juli 2021.
13.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	"Kami sekarang sudah masuk pada <i>worst case scenario</i> , yang sudah kami duga akan naik di atas. Kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu kasus, karena itu nanti musti ada perkiraan lain lagi," ujar Luhut dalam sesi teleconference Kamis (15/7/2021).	https://www.liputan6.com/news/read/4607679/7-pernyataan-menko-luhut-soal-penanganan-terkini-covid-19-di-indonesia , Kamis 15 Juli 2021, https://www.kompas.tv , Kamis 15 Juli 2021.
14.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan	"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.	https://news.detik.com/berita/d-5648735/soal-ppkm-jawa-bali-luhut-minta-maaf-perpanjangan-segera-ditentukan , 19 Juli 2021.

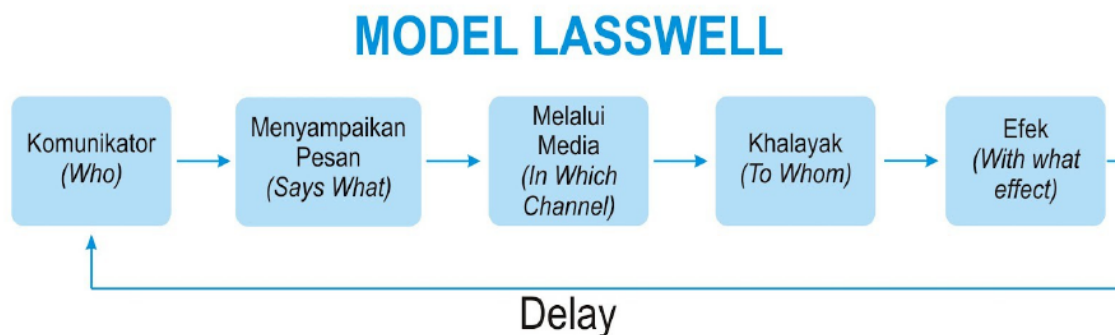
Sumber: diolah dari berbagai media *on line*

Analisis

Pakar komunikasi Harold Dwight Laswell sebagaimana dikutip Onong Uchjana Effendy, mengungkapkan model komunikasi sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*³² (komunikator, pesan, media, khalayak dan efeknya). Interaksi atau proses komunikasi akan berjalan lancar dan

³² Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

sesuai dengan tujuan, manakala kelima unsur komunikasi tersebut memainkan fungsi dan perannya sebagai mestinya.



Kunci keberhasilan proses komunikasi, menurut Jalaluddin Rahmat, bukan saja apa yang ia katakan (pesan), tetapi juga keadaan dia sendiri (komunikator). *He doesn't communicate what he say, he communicates what he is*. Ia tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan. Kadang-kadang siapa lebih penting dari apa.³³

Faktor lain, ada kaitannya dengan gangguan atau kebingungan/kekacauan semantik (*symantic confusion*).³⁴ Selain juga bisa dikarenakan hambatan psikologis berupa perbedaan kepentingan, prasangka, stereotip, motivasi. Hambatan sosiokultural berupa aneka etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampu berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Serta hambatan interaksi verbal seperti polarisasi, orientasi intensional, evaluasi status dan indiskriminasi.³⁵

Hambatan lainnya karena kilir lidah (*slip of tongue*) atau penyakit afasia. Dalam perspektif komunikasi, selip lidah merupakan salah satu jenis penyimpangan atau kesalahan berbahasa lisan. Norissh mengistilahkannya sebagai *lapse*. Dikatakannya, *lapse* atau selip lidah itu merupakan bentuk penyimpangan yang diakibatkan kurang konsentrasi, rendahnya daya ingat, atau sebab-sebab lain yang dapat terjadi kapan saja dan pada siapa pun.³⁶

³³ Rahmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, (Remajakarya, 1986), 261.

³⁴ Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Rajagrafindo, 2011), 156.

³⁵ Ardianto, Elvinaro dkk, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, (Simbiosis Rekatama Media, 2009), 89-100.

³⁶ John Norissh, *Language Learners and Theirs Errors* (London: The Macmillan Press, 1983)

Pertanyaannya kemudian, apakah pernyataan kontroversial sejumlah pejabat tentang Covid-19 karena ada unsur kesengajaan atau karena tidak ada unsur kesengajaan? Jika ada unsur kesengajaan, berarti ada problem psikologis dari pejabat publik bersangkutan. Padahal biasanya sebelum suatu pejabat publik, apalagi setingkat menteri, dilakukan proses penelitian akan jejak rekam (*track record*), termasuk terkait dengan aspek pola komunikasi dan kejiawaan. Sehingga kecil kemungkinan pejabat yang memiliki problem psikologis, termasuk dari sisi etika komunikasi dapat lolos dan diangkat menjadi menteri. Idealnya demikian.

Tetapi dalam konteks Indonesia, pengangkatan pejabat publik se tingkat menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoretik, menurut Peneliti Politik Jayadi Hanan, presiden dalam sistem presidensial itu sudah kuat. Pertama, presiden tak tergantung DPR, tak dapat dijatuhkan DPR karena alasan politik. Kedua, presiden dipilih langsung rakyat, legitimasinya sangat kuat.³⁷

Tetapi dalam implementasinya, presiden tidak sekuasa sebagaimana yang diteoritisasikan. Misalnya dalam dalam pengangkatan menteri dan jabatan 'basah' lainnya seperti komisaris BUMN dimana presiden harus melakukan akomodasi dari kalangan pendukung atau relawan calon presiden saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sehingga terdapat sejumlah pejabat publik, dianggap kurang memiliki profesionalitas, kompetensi, pengalaman dan sebagainya. Kesan bagi-bagi kursi basah paska Pilpres terafirmasi dari hasil penelitian Pusat Studi Politik (Puskapol) LP2SP FISIP Universitas bertajuk 'The Myth of Civil Society's Democratic Role: Volunteerism and Indonesian Democracy' yang menunjukkan, dukungan relawan Jokowi di pemilu memang tak gratis.³⁸

Fenomena dan realitas politik tersebut bukan hanya berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja pejabat publik, dalam pengamatan praktik bagi-bagi

³⁷ Anwar C. Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publishing, Malang, 2011, 162

³⁸ Hurriyah, "The myth of civil society's democratic role: volunteerism and Indonesian democracy." *Jurnal Politik* Vol 4 No. 2 (2019): 237-262.

kekuasaan termasuk ke partai politik nonpengusung yang dilakukan Presiden Jokowi berpotensi mengancam demokrasi, mengakibatkan hampir tiadanya kekuatan penyeimbang, dan merupakan agenda oligarki yang tidak lagi memiliki fatsun politik.³⁹

Di sisi lain, bisa jadi munculnya problem etika komunikasi sejumlah pejabat publik dalam penanganan pandemi Covid-19 akibat terjadinya *slip of tonge*. Sebagai manusia yang dianggap tempatnya salah dan lupa (*mahallul khoto' wal nisyman*), merupakan hal yang wajar. Meski demikian, jika pejabat publik tersebut mengalami *slip of tonge*, mestinya pejabat bersangkutan mengakui, menyadari dan segera meralat pernyataan yang salah atau tidak tepat tersebut secara elegan dan terbuka. Sayangnya hal ini tidak dilakukan. Termasuk misalnya terkait dengan humor seputar Covid-19, sebagaimana dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD dengan mengutip Menko Airlangga. Sementara Menko Airlangga sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi atas humor yang dikutip Menko Polhukam Mahfud MD. Sehingga timbul pertanyaan: "Sebenarnya yang sedang bergurau Airlangga atau Mahfud"?

Sejumlah pejabat publik terkadang tidak akurat dan tidak tepat dari sisi lokasi/tempat saat menyelipkan humor saat pidato atau sambutan, apalagi pidato ilmiah. Seperti diucapkan Menhub Budi Karya kepada Presiden Jokowi yang mengatakan virus corona "tidak ditemukan di Indonesia karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh yang didapat dari kegemaran memakan nasi kucing". Humor ini disampaikan Menhub Budi Karya saat pidato ilmiah dalam acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Juga humor Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang menyebutkan "susu kuda liar dipercaya masyarakat NTB sebagai penangkal virus corona atau Covid-19" pada acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel

³⁹ Mikael Loi, "Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-Jk." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 5 No. 1 (2017)

Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu, 11 Maret 2020 yang kemudian diulangi Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amien di acara yang sama dibubuhi dengan kalimat sebagai humor. Belakangan Kominfo menyebut telah terjadi disinformasi dan menyebut pernyataan Wapres KH. Ma'ruf bukanlah pernyataan resmi beliau disela-sela acara tersebut.⁴⁰

Plato dan Aristoteles dalam teori superioritas dan degradasi serta teori bisosiasi berpendapat "kita akan tertawa apabila menyaksikan sesuatu yang janggal, keliru atau cacat". Sementara Pascal, Kant, Spencer, Schopenhauer dan sebagainya menyebut, humor timbul karena kita menemukan hal-hal yang tidak diduga, atau kalimat yang menimbulkan dua macam asosiasi⁴¹. Pendapat pakar tersebut seyogianya menginspirasi pejabat publik, untuk dapat selektif dan menahan diri saat melontarkan humor. Alasannya, karena pernyataan pejabat publik berpotensi bukan sekadar dipersepsi sebagai humor, melainkan bisa dianggap sebagai suatu kebenaran, kebijakan, arahan atau bahkan instruksi yang harus diikuti bawahan dan masyarakat.

Mungkin menyadari kekhilafannya dalam berkomunikasi seputar Covid-19, diantara pejabat yang gemar melakukan pernyataan kontroversial. Yakni Menko Luhut minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika belum optimal, dan berjanji bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan.⁴² Hanya saja pernyataan maaf Menko Luhut dengan menggunakan kata 'jika'. Hal ini menurut mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra, terkesan tidak ikhlas. Azyumardi Azra menilai, dalam kasus Covid-19, Menteri BUMN Eric Tohir lebih baik karena meminta maaf tidak memberikan yang sempurna. Sekalipun diujung kata diakhiri dengan kalimat "hanyalah Allah yang sempurna".⁴³

⁴⁰<https://kominfo.go.id/content/detail/24993/disinformasi-wapres-kh-ma-ruf-amin-mengungkapkan-bahwa-susu-kuda-liar-dapat-menangkal-virus-corona>, diakses pada 3 September 2021.

⁴¹ Rahmat, Jalaludin, *Retorika Modern*, (Remaja Rosdakarya, 2011), 126-134.

⁴² Varian Delta Lebih Menular daripada Flu Biasa, Begini Kata Para Ahli Global Atta Ta Ta Ta. Jurnal Nusantara, <https://jurnalnusantara.id/profil/2> diakses August 3, 2021

⁴³ Azyumardi Azra, Webinar yang digelar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Selasa, 20 Juli 2021.

Ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, dalam berkomunikasi, apalagi pejabat publik harus mengandung kejujuran atau *fairness*, keakuratan informasi, bebas dan bertanggungjawab dan kritik konstruktif. Kejujuran atau objektivitas komunikasi merupakan etika yang didasarkan pada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran.⁴⁴ Keakuratan dalam komunikasi massa dapat dilihat dari sejauhmana informasi tersebut yang disajikan telah mencapai ketepatan.⁴⁵ Prinsip bebas dan bertanggungjawab harus teraplikasikan dalam cara mencari, mengumpulkan dan menyajikan informasi terhadap publik.⁴⁶

Adanya pejabat yang melontarkan pernyataan kontroversial, selain menunjukkan ketiadaan *sense of crisis* sebagaimana diakui Presiden Jokowi⁴⁷ dan krisis etika komunikasi, pejabat bersangkutan dapat dikategorikan melanggar UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 4 poin 1 yang mewajibkan ASN menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. Kemudian pada Pasal 5 dari UU tersebut mengatur kode etik ASN ayat 2 poin i, yang memerintahkan pejabat publik memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Pastinya, banyaknya pejabat publik yang seiring melontarkan pernyataan kontroversial dan humor yang tidak proporsional tentang Covid-19 menimbulkan berbagai problem etika komunikasi. Dampak lainnya diantaranya *pertama*, image, citra dan opini negatif terhadap pejabat bersangkutan yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik. *Kedua*, kegaduhan, kesimpangsiuran dan ketidakpastian dalam penanganan Covid-19. *Ketiga*, insoliditas kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Keempat*, mempersulit dan menghambat pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. *Kelima*, menjadi penyebab *trend* atau kurva pandemi Covid-19 di Indonesia sulit ditekan dan diturunkan sesegera dan seefektif mungkin.

⁴⁴ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa, Dalam Pandangan Islam*, (Logos, 1999), 66-107.

⁴⁵ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa, Dalam Pandangan Islam*, 99.

⁴⁶ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa, Dalam Pandangan Islam*, 107.

⁴⁷ H.I.N. Goeritman, "Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial (Crisis Communication of Indonesia Government During Pandemic Covid-19 using Social Media)" *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* Vol. 23 No. 1, Juni 2021: 1 - 19, DOI: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.23.1.2021.1%20-%2019>

Simpulan

Dari analisis terhadap pernyataan kontroversial pejabat publik khususnya sejumlah menteri tentang Covid-19 dapat ditarik kesimpulan, cukup banyak pejabat publik yang melontarkan pernyataan kontroversial atau humor mengandung problem etis; tidak atau kurang didukung oleh basis ilmiah, kurang didukung data akurat, fakta empirik; kurang bisa menyampaikan/menyelipkan humor atau guyonan pada lokus atau proporsinya, dan sebagainya.

Fenomena dan realitas ini mencerminkan kurangnya pejabat publik memiliki etika berkomunikasi, kepekaan, simpati, empati dan sensitivitas terhadap krisis atau *sense of crisis* terhadap pandemi Covid-19 dengan berbagai dampak dan eksese negatifnya. Selain juga bisa dikategorikan pejabat publik bersangkutan telah melanggar UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan kode etik ASN.

Untuk itu, pejabat publik disarankan untuk melakukan moratorium dengan cara mengakhiri melontarkan pernyataan kontroversial yang dapat menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat, insoliditas kabinet pemerintahan Joko Widodo dan mengganggu efektivitas pemerintah dan berbagai kalangan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tetap masih mengkhawatirkan.

Sebagai gantinya, pejabat publik diminta untuk selalu mengedepankan etika dan keadaban komunikasi yang berbasis pada metode ilmiah dan data yang empirik, akurat serta berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam konteks komunikasi publik, pejabat publik harus menjadi bagian dari pemecah masalah (*a part of problem solver*) dan jangan menjadi bagian dari pembuat masalah (*a part of trouble maker*).

Sebagai Kepala Negara dan Pimpinan Tertinggi dari pejabat publik, Presiden Joko Widodo disarankan untuk memimpin dan memberikan contoh dan teladan dalam melakukan komunikasi publik etis, serta menertibkan pola atau gaya komunikasi diantara pejabatnya, baik dalam rapat-rapat kabinet maupun di luar. Manakala para pejabat publik tersebut masih tetap tidak disiplin dan acapkali

Ahmad Fahrudin

melanggar etika komunikasi, harus dijatuhkan sanksi yang tegas dan tanpa tebang pilih sesuai tingkat atau bobot kekeliruan atau kesalahannya.

Daftar Pustaka

- Ali, Mukti. *"Antara Komunikasi, Budaya dan Hoak"*, dalam *"Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa"*, Editor: Aep Wahyudin dan Manik Sunuantari, Trustmedia Publishing, 2017.
- Amir, Mafri. *Etika Komunikasi Massa, Dalam Pandangan Islam*, Logos, 1999.
- Ardianto, Elivinaro. *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Budyatna, Muhammad dan Leila Mona Ganiem, *Teori Komunikasi Antarpribadi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2011.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2011.
- Changara, Chafied. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, RajaGrafindo Persada, 2009.
- Dardjowidjojo, Soenjono. *Psikolinguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Devos, Hannes. *Pengantar Etika*, PT Tiara Wacana Yogya, 1987.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik*, (Rosda Karya), 2019.
- Johannesen, Richard L. *Etika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Karyaningsih, RR. Ponco Dewi. *Ilmu Komunikasi*, Samudra Biru, 2018.
- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat-Kanisisus, Yogyakarta, 1987.

- Moleong, J. Lexxi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung 2007.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Paska-Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2011.
- Rahmat, Jalaludin. *Retorika Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rahmat, Jaluddin. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remajakarya, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2013.
- Sumadiria, AS Haris. *Jurnalistik Indonesia, Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Media Online

- <https://kabar24.bisnis.com/read/20210717/15/1418883/koordinator-tim-pakar-covid-19-indonesia-sudah-seperti-india>, Sabtu, 17 Juli 2021.
- <https://www.walhi.or.id/pemerintah-indonesia-harus-menyudahi-ketidakseriusannya-dalam-penanggulangan-wabah-pandemi-covid-19>, diakses pada 3 September 2021.
- <https://news.detik.com/berita/d-5160592/kemenag-jelaskan-maksud-fachrul-razi-soal-agen-radikalisme-good-looking>, Jum'at 8 September 2020.
- <https://nasional.tempo.co/read/1309677/alasan-muhadjir-effendy-usul-fatwa-orang-kaya-nikahi-orang-miskin>, Kamis, 20 Februari 2021.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-covid-19?>, 06 April 2020.
- <https://news.detik.com/bbc-world/d-4967000/deretan-pernyataan-kontroversial-pemimpin-dunia-seputar-virus-corona>, Senin 6 April 2020.
- <https://kominfo.go.id/content/detail/24993/disinformasi-wapres-kh-ma-ruf-amin-mengungkapkan-bahwa-susu-kuda-liar-dapat-menangkal-virus-corona>, diakses pada 3 September 2021.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/323988/ini-pidato-presiden-jokowi-memarahi-pejabat-tidak-sense-of-crisis>, Senin 29 Juni 2020.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/28/menguatkan-sistem-presidensial>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/bagi-bagi-kursi-di-kabinet-pukat-ugm-agenda-oligarki-tanpa-fats>